



**Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan
jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id

2015

Yurisprudencia

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial

Penanggungjawab

Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, MA

Redaktur Tim Penyusun

Nur Azizah, MA

Penyunting,

Dermina Dalimunthe, SH., MH

Musa Aripin, SHI., MSI

Desain Grafis

Dede Rahwandi Harahap, SHI

Sekretariat Tim Penyusun

Sukerman, S.Ag

Putra Halomoan Hasibuan, SH., MH

Adanan Murroh, MA

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan

e-mail: yprudencia@gmail.com

2015

Salam Redaksi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, berkat taufik dan inayah Allah SWT, Jurnal el-Qanuniy ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan Allah SWT selalu kepada Nabi Muhammad SAW.

Pembaca yang budiman!

Jurnal *Yurisprudentia* merupakan jurnal Huku Ekonomi Syariah. Terbitnya jurnal ini sudah lama dinanti-nanti oleh kalangan akademisi. Segenap redaksi mengucapkan terima kasih, atas amanah yang diberikan oleh para kontributor/penulis untuk memuat tulisan mereka pada jurnal ini.

Ahmatnizar memulai tulisan jurnal ini dengan menjelaskan tentang Organisasi yang ada pada umumnya memiliki tingkat heteroginitas yang tinggi, sehingga sangat potensial akan terjadinya konflik organisasi baik konflik individu maupun konflik kelompok. Mekanisme ataupun manajemen konflik yang diambil pun sangat menentukan posisi organisasi sebagai lembaga yang menjadi payungnya. Kebijakan-kebijakan dan metode komunikasi yang diambil sangat memengaruhi keberlangsungan sebuah organisasi dalam memertahankan anggoa dan segenap komponen di dalamnya.

Fatahuddin Aziz menuangkan pandangannya Dalam bidang politik, menceritakan tentang Thaha Husein yang menginginkan umat Islam mengadopsi sistem pemerintahan Barat. Hal ini disebabkan al-Qur'an tidak menjelaskan dengan rinci sistem pemerintahan yang harus diikuti ditambah dengan sistem pemerintahan Eropa itu tidak berlandaskan agama Kristen. Oleh karenanya, tidak salah bila pemerintahan Islam mengadopsi sistem pemerintahan Eropa. Dengan sistem pemerintahan tersebut nilai-nilai ajaran al-Qur'an akan dapat diakomodir di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Mahmuddin melalui tulisannya mengajak kita untuk melihat kemajuan umat Islam di Spanyol yang telah mencapai berbagai kemajuan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Indikasi historis tentang kemajuan-kemajuan umat Islam itu antara lain adalah keberhasilan mereka membangun peradaban yang par excellence di berbagai kota Spanyol serta keberhasilan mereka mencapai temuan-temuan ilmiah yang cemerlang dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Banyak para ilmuwan dan intelektual yang lahir dari daratan Spanyol dan tidak sedikit pula peninggalan-peninggalan sejarah Islam yang sangat mengesankan. Muslim Spanyol tercatat dalam dalam satu periode sejarah yang paling gemilang dalam bidang intelektual di Eropa pada abad pertengahan

Menurut SUMper Mulia Harahap metode istinbat hukum syiah dalam kitab al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyah karya abu Ja'far Muhammad ibn al-Husain ibn Ali at-Tusi

memiliki daya tarik tersendiri untuk dibahas. Abu Ja'far at-Tusi adalah salah satu tokoh penting pada kelompok Syi'ah. At-Tusi menempati posisi sebagai pemikir dan pemimpin berpengaruh bagi golongan ini. Gelar Syaikh at-Taifah sebagaimana juga tercantum pada sampul bukunya berjudul *al-mabsut fi fiqh al-imamiyah*, merefleksikan ketokohnya yang demikian kuat dan mengakar pada mazhab yang banyak dianut terutama di wilayah Iran dan Irak ini. At-Tusi dikenal sebagai ilmuwan multidisipliner, berbagai disiplin ilmu dikuasainya dengan sangat baik dan melahirkan banyak karya termasuk fiqh dan ushul fiqh

Zainal Aripin Purba menilik tentang Dunia usaha sekarang ini semakin berkembang dan membutuhkan pengelolaan yang semakin baik dan sehat. Perusahaan publik menuntut agar setiap pimpinan dan seluruh karyawannya dapat menunjukkan tindakan yang terpuji kepada stakeholder dan dapat bertanggungjawab atas semua tindakan dan keputusannya dalam mengelola perusahaan. Guna meningkatkan performansi perusahaan kearah yang lebih baik, maka perusahaan harus dikelola secara professional dengan mengindahkan prinsip-prinsip Good Governance. Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan, peningkatan keuntungan akan tetapi juga performa internal perusahaan (etika dan Good Corporate Governance) dan performa kepedulian sosial perusahaan.

Ahmatnizar dalam rubrik layanan pendidikan melirik tentang tentang Perguruan Tinggi ibarat perusahaan jasa yang harus menyediakan layanan prima bagi mahasiswanya jika ingin tetap survive. Dalam rangka penerapan otonomi perguruan tinggi akan berhadapan dengan banyak hal antara lain sikap dan budaya kerja yang kurang disiplin, terbatasnya SDM, pada sisi lain menekankan bahwa pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik serta rakyat banyak. Jika perguruan tinggi dimaknai tidak hanya berperan sebagai pengembang dan tempat menggali ilmu pengetahuan, tetapi lebih jauh dapat dikatakan sebagai industri jasa, maka unsur pelayanan kepada mahasiswa sebagai stakeholder pertama harus prima, terjamin, memuaskan, dan diharapkan tidak berbentuk pelayanan ala birokrat.

Zul Anwar Ajim Harahap mengawali dengan sebuah kenyataan bahwa keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia jika ditinjau dari teori eksistensi membuktikan bahwa sesungguhnya hukum Islam sudah eksis di Indoensia dengan beberapa bentuknya sebagaimana ketentuan yang ada dalam teori tersebut. Kenyataan tersebut semata-mata untuk meresponi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman.

Tulisan tersebut difokuskan pada pembuktian akan adanya hukum Islam dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam bidang kesehatan karena kurang lebih fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI selama 14 tahun, di dalamnya ditemukan tentang fatwa-fatwa dalam masalah kesehatan, yaitu masalah

KB dan transpalansi anggota tubuh, aborsi, transfusi darah dan hukum Islam lainnya yang terkait yang sudah ada dalam bentuk fatwa.

Habibi menelaah secara kritis ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kaitannya dengan pendekatan yang digunakan untuk menangani perkara. Hasil analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan per se illegal atau rule of reason dalam beberapa ketentuan pasal-pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak selalu tepat. Ketentuan pasal 5 yang melarang secara per se illegal terhadap penetapan harga, padahal tidak semua penetapan harga selalu tepat dinilai dengan pendekatan tersebut. Ketentuan pembagian wilayah dalam pasal 9 ditentukan dengan rule of reason, padahal pada umumnya negara menetapkan secara per se illegal. Demikian pula terhadap kartel yang dalam pasal 11, pada umumnya negara menetapkan secara per se illegal, tetapi ditetapkan secara per se rule of reason.

Hak Perwalian merupakan hal yang perlu disampaikan merut Dermina Dalimunthe. Putusnya perkawinan mengakibatkan kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian, hak perwalian pasca putus perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat terjadi karena adanya kematian salah seorang orangtua atau kedua orangtua, perceraian dan adanya putusan hakim atau putusan pengadilan, dan hilangnya kekuasaan orang tua karena dipecat atau dibebaskan.

Sri Minda Menutup Rangkaian Tulisan Jurnal ini dengan menguraikan hasil penelitiannya, yang bertujuan untuk menggambarkan fitur pragmatis pertanyaan tag dan perludangan terhadap nilai-nilai ucapan-ucapan pria dan wanita di dalam sidang pengadilan. tulisan ini menggambarkan fitur pragmatis pertanyaan tag dan hedge menyadari dalam ucapan-ucapan pria dan wanita tidak berbeda secara signifikan.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak. Redaksi menerima segala kritik konstruktif demi kemajuan jurnal ini pada masa yang akan datang. Wassalam!

Padangsidimpuan, Desember 2015
Redaksi

Salam Redaksiiv-vii

Daftar Isi viii

Pedoman Transliterasiix

Pragmatisme Hukum Islam.1-16
Ahmatnijar, M.Ag

Dimensi Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam17-29
Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre.....30-46
Dr. Mahmuddin Siregar, MA

Metode Istimbath Hukum Ibn Timiyah47-61
Dr. H. Sumper Mulia Harahap

**Sinkronisasi Hukum Islam Dalam KHI Mengenai Ketentuan
Murtad Sebagai Alasan Perceraian62-81**
Johan Alamsya, S.H., M.H

**Konsep Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan
Hukum Islam.....82-98**
Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Metode Istimbath Hukum Muhammad Syahrur99-114
Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

Kajian Islam Terhadap Konsep Zakat dan pajak Pada Era Modern115-127
Mudzakkir Khotib Siregar, M.A

**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut
Unit Usaha Syariah Cabang Padangsidempuan128-130**
Habibi, S.H., M.Hum

Metode Pengembangan Perbankan Syariah.....131-143
Rukiah, S.E., M.Si

TRANSLITERASI

Konsonan

ء	’	د	D	ض	d}	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	t}	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	z{	م	m
ث	ts	ز	Z	ع	‘	ن	n
ج	J	س	S	غ	gh	و	w
ح	h{	ش	sy	ف	f	هـ	h
خ	kh	ص	s}	ق	q	ي	y

Diftong

اَـوْ = Aw
اَـيْ = Ay
اَـيْ = i<< (i pada akhir kata)
اَـوْ = u< (u pada akhir kata)

Vokal Pendek	Vokal Panjang
اَ = a	اَ = a >
اِ = i	اِ = i >
اُ = u	اُ = u >